Volume 7 Issue 2 (2024) Pages 504 - 518
SEIKO : Journal of Management & Business
ISSN : 2598-831X (Print) and ISSN : 2598-8301 (Online)

Peningkatan Ketahanan Ekonomi Untuk UMKM Berkelanjutan Berbasis Konsep *Blue Economy* Pada Pantai Kenyamukan Sangatta Kutai Timur

Nuuridha Matiin ✉ **Andi Mursalim** [2] **Andi Indrawati** [3]
STIE Nusantara Sangatta[1,2] Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda[3]

Abstrak

Ekonomi Biru didefinisikan sebagai: berkelanjutan pembangunan yang menggabungkan manfaat sosio-ekonomi dan konservasi ekologi dan pada dasarnya berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan pelestarian atau peningkatan penghidupan sekaligus menjamin kelestarian lingkungan danau, sungai,lautan dan wilayah pesisir Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi sektor pendukung ekonomi biru di Pantai kenyamukan di Kutai Timur terhadap perekonomian berkelanjutan dan tantangan yang dihadapi Masyarakat UMKM dalam mengembangkan usahanya dengan basis konsep ekonomi biru dan mencari Strategi yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ketahanan ekonomi untuk UMKM daerah pantai kenyamukan, Metode dengan mengedarkan kuesioner, test, Wawancara terstruktur serta pengambilan teknik sampling dengan menggunakan cluster sampling, Penggunaan metode survei akan memudahkan peneliti untuk memperoleh data untuk diolah dengan tujuan memecahkan masalah, dengan menggunakan Analisa Swot untuk mengetahui strategi model yang akan di menjadi masukan untuk pemerintah Khususnya pada Kabupaten Sangatta di Kutai Timur, Hasil dari penelitian ini pada Strategi Kekuatan-Peluang Peningkatan pengetahuan UMKM yang dapat di kembangkan oleh pemerintah Kutai Timur,Peningkatan partisipasi masyarakat setempat dengan keterpaduan pengelolaan pemanfaatan sumber-sumber daya pesisir berkelanjutan, Strategi Kelemahan- Peluang (W-O) Penyuluhan sadar wisata dengan membuat kelompok-kelompok masyarakat dengan melibatkan elemen mayarakat dan penggiat pariwisata dari lingkungan pemerintah dan swasta, Pemerintah dapat mengatur hubungan kerjasama dengan pemerintah daerah dan stakeholder untuk mengelola kawasan wisata mangrove berkelanjutan, Strategi Kekuatan – Ancaman (S-T) Perlu dukungan pemerintah tentang pengetahuan pengembangan usaha berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam di sekitar pantai kenyamukan, Memanfaatkan dana CSR perusahaan multinasional dan bekerjasama dengan penggiat lingkungan yang ada di Kutai Timur, Strategi Kelemahan – Ancaman (W-T) Mengoptimalkan Pelatihan dan edukasi pada UMKM yang ada di Pantai Kenyamukan dan sekitarnya, Meningkatkan kesadaran dari seluruh pihak agar kebersihan lokasi wisata tetap terjaga.

Kata Kunci: Peningkatan Ketahahanan Ekonomi; UMKM; Blue Economy; Pantai Kenyamukan; sektor pendukung ekonomi biru.

Abstract

Blue Economy is defined as: sustainable development that combines socio-economic benefits and ecological conservation and basically seeks to encourage economic growth, social inclusion, and preservation or improvement of livelihoods while ensuring the sustainability of the environment of lakes, rivers, oceans and coastal areas The purpose of this study was to determine how much the contribution of the supporting sector of the blue economy in Kenyamukan Beach in East Kutai to the sustainable economy and the challenges faced by the MSME Community in developing their businesses based on the concept of a blue economy and to find strategies that can be carried out by the government to increase economic resilience for MSMEs in the Kenyamukan beach area, The method is to distribute questionnaires, tests, structured interviews and sampling techniques using cluster sampling, The use of the survey method will make it easier for researchers to obtain data to be processed with the aim of solving problems, using SWOT Analysis to determine the model strategy that will be input for the government, especially in Sangatta Regency in East Kutai, The results of this study on the Strength-Opportunity Strategy Increasing MSME knowledge that can be developed by the East Kutai government, Increasing local community participation with integrated management of sustainable coastal resource utilization, Weakness-Opportunity (W-O) Strategy Tourism awareness counseling by creating community groups involving community elements and tourism activists from government and private sectors, the government can regulate cooperative relationships with local governments and stakeholders to manage sustainable mangrove tourism areas, Strength - Threat Strategy (S-T) Need government support regarding knowledge of sustainable business development by utilizing natural resources around Kenyamukan Beach, Utilizing CSR funds from multinational companies and collaborating with environmental activists in East Kutai, Weakness - Threat Strategy (W-T) Optimizing training and education for MSMEs in Kenyamukan Beach and its surroundings, Increasing awareness from all parties so that the cleanliness of tourist locations is maintained.

Keywords: *Economic Resilience Enhancement; MSMEs; Blue Economy; Kenyamukan Beach; blue economy supporting sectors.*

Copyright (c) 2024 Nuuridha Matiin

✉ Corresponding author :
nuuridhamatiin@stienusantara.ac.id

Email Address : nuuridhamatiin@stienusantara.ac.id, andimursalin@stienusantara.ac.id, andriindrawaty@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Blue Economy berakar pada arena pembangunan berkelanjutan internasional dan bertujuan untuk membuka peluang bagi perekonomian dan masyarakat sekaligus melindungi dan meningkatkan lingkungan laut. Sampai saat ini, belum ada analisis mengenai bagaimana tujuan utama keberlanjutan telah mempengaruhi pesatnya pembangunan kebijakan ekonomi biru pada skala nasional dan regional (Niner et al., 2022)

Perekonomian kelautan mengalami pertumbuhan pesat yang akan memberikan manfaat namun juga menimbulkan risiko lingkungan dan sosial. Dengan terbatasnya ruang dan sumber daya yang terdegradasi di wilayah pesisir, perairan lepas pantai akan menjadi fokus khusus perluasan Ekonomi Biru pada dekade mendatang sektor ekonomi berkembang di perairan lepas pantai (dalam Zona Ekonomi Eksklusif nasional)(Novaglio, 2022)

Gagasan *Blue Economy* yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sektor Kelautan dan Perikanan 2013–2025 disebut sebagai industri kelautan dan perikanan di Indonesia (Wiratma, 2018). Ungkapan "samudra biru, langit biru" mengacu pada konsep "*Blue Economy* " yaitu model ekonomi yang menekankan kelestarian lingkungan sekaligus mengedepankan kesejahteraan manusia (Y. A. Wahyuddin et al., 2022)(Dhani Akbar et al., 2022)

Konsep Blue Ekonomi secara luas mencangkup pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berbasis kegiatan kelautan dengan melibatkan semua aspek untuk mencapai stabilitas regional suatau negara (Wiratma, 2018) Ekonomi Biru didefinisikan sebagai: berkelanjutan pembangunan yang menggabungkan manfaat sosio-ekonomi dan konservasi ekologi dan pada dasarnya berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan pelestarian atau peningkatan penghidupan sekaligus menjamin kelestarian lingkungan danau, sungai,lautan dan wilayah pesisir (Dhani Akbar et al., 2022)

Ekonomi biru memanfaatkan sumber daya laut untuk meningkatkan pangan keamanan, peningkatan gizi dan kesehatan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja baru (Dhani Akbar et al., 2022) menghasilkan energi alternatif, meningkatkan perdagangan lintas laut dan profil industri dengan melindungi kesehatan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Itu Visi ekonomi biru mencerminkan pembangunan ekonomi dan kesehatan laut sebagai proposisi yang kompatibel (Dhani Akbar et al., 2022), Apabila potensi sumber daya ini dikelola secara berkelanjutan, akan ada dampak positif terhadap ekonomi dan lingkungan. Namun, upaya ini juga menghadapi banyak tantangan sosial ekonomi (Nasution, 2022), seperti danau, sungai dan sumber daya air lainnya, terutama di negara-negara anggota yang kontribusinya rendah terhadap perekonomian nasional (di bawah 1%). Namun, perubahan iklim merupakan hambatan utama untuk sepenuhnya mewujudkan kondisi yang mendukung hal tersebut akan mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan iklimnya harus dipromosikan(Petrea et al., 2021)

Penelitian ini penting bagi masyarakat pesisir karena pemahaman mereka terhadap konsep ekonomi biru masih rendah. Masyarakat pesisir didominasi oleh nelayan dan mengandalkan sumber daya perikanan sebagai mata pencaharian utama, namun masyarakat pesisir masih kurang memiliki kesadaran ekosistem.

Pada Kawasan pantai Kenyamukan dan sekitarnya termasuk dalam Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dengan luasan sekitar kurang lebih 900 ha. Secara geografis daerah Pantai Kenyamukan terletak antara 107°08' BT107°58' BT dan

02°30' LS sampai 03°15' LS. Melihat kondisi topografi Pantai Kenyamukan yang pada umumnya bergelombang dan berbukit-bukit telah membentuk pola aliran sungai di daerah ini menjadi pola Sentrifugal, dimana sungai-sungai yang ada berhulu di daerah pegunungan dan mengalir ke daerah pantai, sedangkan daerah aliran sungai mempunyai pola aliran sungainya berbentuk seperti pohon. Daerah Kenyamukan ini berjarak kurang lebih 9 km ke arah Timur dari Pusat Kota Sanggatta sebagai Ibukota dari Kabupaten Kutai Timur. Mayarakat disana belum sadar dengan potensi alam disekitarnya, sehingga banyak ibu rumah tangga hanya mengandalkan pendapatan dari suaminya, padahal daerah pantai kenyamukan setiap harinya ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal, Kepada pengunjung dan keunggulan mangrove yang bisa dikelola menjadi souvenir maupun cinderamata Keunikan potensi mangrove yang digabungkan dengan pantai merupakan wisata dengan keunikan tersendiri sehingga pemanfaatan tambak ikan,udang sebagai pemancingan dapat dijadikan sebagai aktraksi tambahan Perlunya dukungan pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan lokakarya secara berkelanjutan pada masyarakat setempat wisata mangrove agar menjaga lingkungan dan sekitarnya.

Meskipun peranan UMKM dalam perekonomian adalah strategis dan sentral diantaranya karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil pembangunan. UMKM seringkali terabaikan hanya karena hasil produksinya dalam skala kecil dan belum mampu bersaing dengan unit usaha lainnya. Padahal UMKM terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis.(Hossain et al., 2021), Pendekatan berkelanjutan, meningkat, dan fleksibel. Walaupun masih berupa kebijakan dan rencana, pariwisata harus dilihat sebagai suatu proses yang berkelanjutan dengan melakukan penyesuaianpenyesuaian sesuai kebutuhan dan berdasarkan monitor dan umpan balik *(feedback)* dalam rangka mempertahankan tujuan dan kebijakan pengembangan pariwisata.(Y. A. Wahyuddin et al., 2022)

Sehingga penulis ingin melihat Peningkatan Ketahahanan Ekonomi Untuk UMKM Berkelanjutan Berbasis Konsep *Blue Economy* Pada Pantai Kenyamukan Sangatta Kutai Timur, terlihat dari potensi dan tantangan pengembangan ekonomi biru di Kalimantan Timur sendiri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam Provinsi Kalimantan Timur khususnya di daerah Kutai Timur.

Urgensinya adalah beberapa penelitian telah dilakukan mengenai kontribusi pariwisata kelautan, perikanan dan pesisir terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun penelitian-penelitian tersebut bersifat regional dan tidak berfokus pada UMKM berkelanjutan khususnya dalam peningkatan ketahanan ekonomi, dan beberapa peneliti tidak menjelaskan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan ekonomi biru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, strategi-strategi yang perlu dilakukan pemerintah, juga tidak menggambarkan kontribusi perekonomian sektor industri di sektor kelautan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap hal tersebut.

Rumusan masalah :

1) Seberapa besar kontribusi sektor pendukung ekonomi biru di Pantai kenyamukan di Kutai Timur terhadap perekonomian berkelanjutan;
2) Tantangan apa saja yang dihadapi Masyarakat UMKM dalam mengembangkan usahanya dengan basis konsep ekonomi biru;
3) Strategi apa yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ketahanan ekonomi untuk UMKM daerah pantai kenyamukan.

METODOLOGI

Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan kualitatif dilakukan dengan pembahasan uraian atau penjelasan atas data yang diperoleh dari metode studi Pustaka dan Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan datanya. peneliti melakukan studi literatur kemudian mengidentifikasi masalah dan merumuskan sekaligus tujuan penelitian, perlakuan dalam pengumpulan data, kemudian mulai mengelompokkan berdasarkan teori dilanjutkan dengan mengedarkan kuesioner, test, Wawancara terstruktur serta pengambilan teknik sampling dengan menggunakan cluster sampling: Cluster berarti pengelompokan berdasarkan wilayah atau lokasi populasi. Penggunaan metode survei akan memudahkan peneliti untuk memperoleh data untuk diolah dengan tujuan memecahkan masalah, dengan menggunakan Analisa Swot untuk mengetahui strategi model yang akan di menjadi masukan untuk pemerintah Khususnya pada Kabupaten Sangatta di Kutai Timur

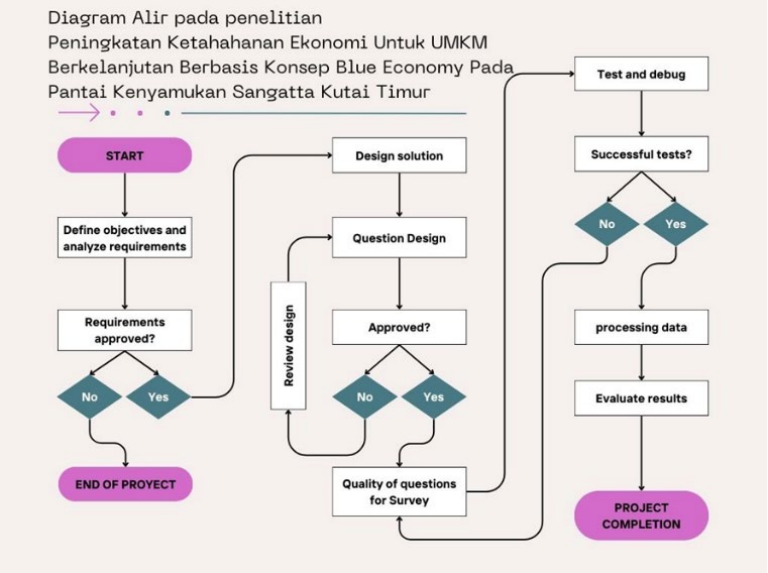

Gambar 3 Diagram Alir Penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Blue Economy

Blue Economy merupakan paradigma pembangunan nasional melalui pembangunan laut berkelanjutan yang terintegrasi dengan tata kelola laut yang dapat menjadi basis pertahanan usaha yang berkelanjutan, berdampak bagi lingkungan sekitar dengan mengeksplorasi sumber daya laut tanpa merusak ekosimstem yang sudah ada (Jones & Navarro, 2018)

Konsep blue economy bertujuan untuk memberikan tidak hanya pemahaman tetapi tantangan bagi para pengusaha untuk mengembangkan sumber daya perikanan yang melimpah yang lebih menguntungkan secara efisien dan efektif, tetapi bagaimana

memanfaatkan potensi yang ada, menciptakan suatu produk yang bernilai jual tinggi dan berkualitas, dengan memanfaatkan tenaga kerja sekitar yang jauh lebih memahami kontur dan kondisi wilayah atau lingkungan setempat, agar mampu menciptakan pemahaman dan pola penjagaan atau pengelolaan yang tepat dan baik bagi lingkungan sekitarnya, bagaimana menciptakan sebuah usaha yang bermanfaat dan tidak merusak lingkungan dengan pencemaran terkait sisa proses hasil atau limbah produksi baik di darat maupun di laut. Konsep Blue Economy juga merupakan basis pembangunan yang memberikan perlindungan masyarakat pesisir laut dalam memanfaatkan sumber daya laut demi kesejahteraan manusia dan memajukan industri regional dengan menjaga ekosistem yang sudah ada (Ertör & Hadjimichael, 2020; McKinley et al., 2019).

Istilah ekonomi biru pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010 oleh Gunter Pauli melalui bukunya yang berjudul The Blue Economy: 10 years – 100 innovations – 100 million jobs. Ekonomi biru menerapkan logika ekosistem, yaitu ekosistem selalu bekerja menuju tingkat efisiensi lebih tinggi untuk mengalirkan nutrien dan energi tanpa limbah untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi semua kontributor dalam suatu sistem. Selanjutnya, ekonomi biru menitikberatkan pada inovasi dan kreativitas yang meliputi variasi produk, efisiensi sistem produksi, dan penataan sistem manajemen sumber daya. Ekonomi biru kemudian berkembang dan sering dikaitkan dengan pengembangan daerah pesisir. Konsep ekonomi biru sejalan dengan konsep ekonomi hijau yang ramah lingkungan dan difokuskan pada negara- negara berkembang dengan wilayah perairan (laut), yang biasa dikenal dengan Small Island Development States (SIDS). Ekonomi (Y. A. Wahyuddin et al., 2022)

1. Kontribusi sektor pendukung *Blue Economy* di Pantai kenyamukan di Kutai Timur terhadap perekonomian berkelanjutan

Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 35.747,50 km² atau 17% dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai yang dibentuk berdasarkan UU. 47 Tahun 1999, tentang pemekaran wilayah Propinsi dan Kabupaten yang diresmikan oleh Mendagri pada tanggal 12 Oktober 1999. Dengan luas wilayah 35.747,50 km², Kutai Timur terletak di wilayah khatulistiwa dengan koordinat di antara 115°56'26"-118°58'19" BT dan 1°17'1" LS-1°52'39" LU. Kutai Timur memiliki keadaan topografi yang bervariasi, mulai dari daerah dataran seluas 536.200 ha, lereng bergelombang (1,42 juta ha), hingga pegunungan (1,6 juta ha), tersimpan potensi batu bara 5,35 miliar ton. Kabupaten Kutai Timur terdiri dari 18 kecamatan, 2 kelurahan, dan 139 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 416.800 jiwa dengan luas wilayah 35.747,50 km² dan sebaran penduduk 12 jiwa/km. Beradasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kutai Timur memiliki batas-batas sebagai berikut:

a. Batas Utara : Kabupaten Berau
b. Batas Timur : Selat Makassar
c. Batas Selatan: Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang 3-43

d. Batas Barat : Kabupaten Kutai Kartanegara

Perekonomian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestik regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku mencapai Rp 211.094,48 milyar sedangkan ditinjau atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usahansebesar Rp 97.174,42 milyar. Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha

Kawasan hutan mangrove di Pantai Kenyamukan merupakan tempat wisata yang berada di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur. memiliki potensi yang tinggi dibidang pariwisata kawasan yang memiliki potensi wisata hutan mangrove dengan luasan 887,02 Ha, untuk mendorong dalam pertumbuhan sektor unggulan dan perekonomian di Kabupaten Kutai Timur. memiliki berbagai sumber kekayaan alam terbuka dan memiliki sumber potensial yang baik untuk dikembangkan. Kabupaten Kutai Timur memiliki kawasan hutan mangrove yang dapat dikelola melalui wisata kreatif yaitu inovasi dan kreasi sehingga dapat memajukan perekonomian daerah serta dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas daerah tersebut.

Di Indonesia juga telah menyusun rencana tata ruang laut dengan mengidentifikasi wilayah laut yang sesuai untuk kegiatan ekonomi, dan wilayah laut yang tetap harus dilindungi. Integrasi antara rencana tata ruang laut ini dengan sistem perizinan usaha kini diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan yag dilakukan telah mematuhi peraturan zonasi. Sistem "*scorecard*" dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan dan merencanakan implementasi pembangunan, dengan berbagai indikator yang mengukur status sumber daya pesisir dan laut, seperti luas mangrove dan kualitas terumbu karang. Dalam jangka panjang, Indonesia dapat mempertimbangkan untuk menyiapkan kadaster bagi kawasan laut dan pesisir (*spatial title registry*) guna menghindari konflik tata guna wilayah laut dan pesisir. Adapun sektor pendukung *Blue Economy* di Pantai kenyamukan di Kutai Timur yaitu

a. Pariwisata Pesisir

Area Hutan Mangrove di Provinsi Kalimantan Timur adalah 775.660 ha, salah satunya berada di Kabupaten Kutai Timur. Ekosistem mangrove di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Kutai Timur dijumpai di Kecamatan Teluk Pandan dan Kaliorang terdiri dari jenis *Avicennia sp, Sonneratia sp dan Rhizophora sp*, di Kecamatan Sangatta Selatan didominasi oleh jenis mangrove yang sama, sementara di Kecamatan Bengalon dan Sandaran terdapat jenis Avicennia sp dan Sonneratia sp., Kecamatan Sangatta Utara yang terdapat di lokasi Jely Aquatic dan 3-69 Kenyamukan, jenis mangrove yang ada di lokasi tersebut didominasi oleh dari Jenis *Avicennia sp, Rhizhopora sp dan Nypha sp.*

Kawasan hutan mangrove Kenyamukan ini sendiri terletak di pesisir

sebelah timur di wilayah Kabupaten Kutai Timur, lokasinya berada dekat dengan Pelabuhan Kudungga, Pelabuhan KPC Tanjung Bara, Kantor Bupati Kutai Timur dan Komplek Perkantoran Bukit Pelangi. Daerah Kenyamukan ini berjarak kurang lebih 9 km ke arah Timur dari Pusat Kota Sanggatta sebagai Ibukota dari Kabupaten Kutai Timur. Kawasan Kenyamukan ini memanjang dari utara ke Selatan, menghadap arah timur menuju ke perairan lautan lepas dari Selat Makassar yang memisahkan antara Pulau Kalimantan di sisi barat dengan Pulau Sulawesi di sisi Timur

Dengan memperhatikan kondisi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025, kebijakan nasional serta mempertimbangkan kecenderungan kondisi global, lokal dan regional maka disusun Visi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan Timur yang terpadu dan berkelanjutan menuju masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang adil dan sejahtera .

Adapun beberapa objek wisata yang berpotensi yakni objek wisata alam kawasan pantai dan pulau. Disamping itu, banyak objek wisata yang menarik lainnya, menjadikan Kabupaten Kutai Timur sebagai salah satu tujuan wisatawan.

Tabel Objek Wisata Kabupaten Kutai Timur

No	Wilayah	Objek Wisata
1.	Zona Sangatta	Taman Nasional Kutai
		Pantai Kenyamukan
		Pantai Alien
2.	Zona Sangkulirang	Desa Benua Baru
		Pulau Birah-Birahan
		Pantai Jepu - Jepu, Bual - Bual dan Selangkau
		Desa Pengadan
3.	Zona Muara Wahau	Desa Muara Wahau
		Desa Miau Baru
		Gunung Kung Beang
		Desa Sepanjang Sungai Wahau/Telen
		Hutan Lindung Wehea

Sumber : kutaitimurkab.go.id-2023

b. Industri perikanan

Sumber daya sektor perikanan di Kabupaten Kutim belum digarap maksimal. Padahal produksi ikan dari nelayan Kutim melimpah. Jika ditangani dengan baik, tentu bisa mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). asil tangkapan ikan nelayan Kutim cukup bagus, namun mereka belum dapat

pangkalan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang ada di pesisir Kenyamukan, Kecamatan Sangatta Utara. Sarana dan pra sarana di TPI tersebut belum lengkap. Meski demikian, lokasi itu merupakan ranah provinsi, kabupaten tak bisa berbuat banyak. luas pengelolaan laut Kutim dimulai dari 0–4 mil atau sekitar 2.641 kilometer persegi. Dengan jumlah tersebut pemanfaatan laut sebagai sumber pencarian untuk masyarakat Kutim cukup menjanjikan. Demikian pula dengan produksi hasil perikanan.

Untuk menarik minat nelayan berlabu di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) kenyamukan Sangatta perlu terus ditingkatkan sarana dan prasarana Pelabuhan tersebut khususnya dibangun Solar Pack Dealer Nelayan (SPDN) untuk nelayan,

Peluang usaha di industri perikanan di Pantai kenyamukan cukup menjanjikan, karena beberapa hal, di antaranya:

a. Pantai kenyamukan merupakan penghasil ikan yang lumayan banyak.
b. Konsumsi ikan pada masyarakat Kutai Timur cukup besar
c. Harga ikan di Kutai Timur tidak mahal.
d. Banyak makanan tradisional di Kutai Timur yang menggunakan ikan, seperti siomay, bakso, otak-otak, pempek, dan kerupuk.
e. Ikan air laut memiliki kandungan gizi yang tinggi dan rasa yang lebih gurih dan segar dibandingkan ikan tawar.
f. Harga ikan air laut relatif stabil dan penggemarnya cukup banyak.

Beberapa peluang usaha di industri perikanan, di antaranya:

a. Budidaya ikan air laut
b. Usaha pengolahan ikan
c. Usaha transportasi ikan hidup
d. Usaha distribusi ikan
e. Usaha restoran yang menyajikan menu ikan
f. Industri kecil galangan kapal perikanan
g. Usaha pembuatan alat penangkapan ikan
h. Usaha pembenihan ikan
i. Budidaya pakan alami

Untuk meningkatkan potensi perikanan budidaya, diperlukan teknologi seperti *auto feeder,* IoT tambak, dan *water equality equipment.*

3. Tantangan yang dihadapi Masyarakat UMKM dalam mengembangkan usahanya dengan basis konsep *Blue economy*

Konsep perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif secara langsung akan mempengaruhi beberapa aspek pembangunan nasional, diantaranya adalah aspek pembangunan masyarakat, pembangunan ekonomi nasional maupun pembangunan

daerah. Konsep pembangunan industri pariwisata dan ekonomi kreatif akan terus maju dan berkembang secara dinamis dan berkelanjutan dengan menyesuaikan kondisi perkembangan strategis pembangunan baik dalam tingkat pembangunan lokal maupun tingkat pembangunan global (Noviarita et al., 2021).

Kesuksesan pembangunan masyarakat yang secara tidak langsung akan mampu meningkatkan pola fikir masyarakat untuk meningkatkan sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), karena seiring dengan meningkatnya industri pariwisata pada setiap daerah di lingkungan masyarakat maka secara langsung akan menimbulkan dampak ekonomi terhadap lingkungan di sekitarnya Pada proses pengembangannya, daya tarik destinasi wisata sebaiknya dibangun dengan sinergisitas yang baik seperti menyesuaikan dengan tingkat ketertarikan masyarakat terhadap destinasi lainnya mapun ciri khas yang berbeda pula, tentu hal ini harus diimbangi dengan pembangunan fasilitas wisata, fasilitas umum, aksesibilitas/sarana prasarana yang baik, dan pada kenyataanya tidak kalah penting untuk diperhaikan bahwa pembangunan pariwisata haruslah berbasis pada pemberdayaan masyarakat sekitar. Proses pemberdayaan masyarakat harus mengadopsi sistem yang utuh dan berkelanjutan. Potensi tersebut sekaligus dapat menjadi variabel penunjang pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Beberapa kegiatan yang diadakan oleh masyarakat sekitar seperti penataan kawasan wisata dalam meningkatkan manfaat tanaman mangrove ditandai dengan kepedulian masyarakat untuk selalu menjaga dan merawat tanaman mangrove yang sudah ada dalam pengembangan destinasi wisata mangrove. Masyarakat sekitar antusias gotong royong dalam memperbaiki fasilitas yang rusak, membangun tempat usaha yang lebih baik, melakukan kegiatan kerja bakti bersama, dalam menjaga lingkungan wisata mangrove seperti tidak merusak faslitas, tidak membuang sampah sembarangan dan yang terpenting tidak merusak tanaman mangrove di daerah sekitar.

Adapun beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan mengembangkan usahanya dengan basis konsep *Blue economy* ada beberapa yaitu :

1. Terbatasnya Pendanaan APBN dalam Mendukung *Blue Economy*
   Untuk memenuhi pendanaan tujuh agenda pembangunan yang tertera dalam RPJMN 2020-2024, dibutuhkan pendanaan sebesar USD 1.641,3 miliar. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu mendanai sekitar 20-25 persen dari kebutuhan tersebut, termasuk kebutuhan sektor kemaritiman, perikanan dan kelautan. Sehingga sulit membebankan tanggung jawab untuk mengembangkan *blue economy* hanya dengan dana APBN. Pada tahun 2020 sebagai bentuk respon pemerintah dalam mengahadapi pandemi Covid-19, pemerintah melakukan revisi APBN 2020 untuk menambahkan anggaran sekitar Rp 695 triliun sebagai langkah untuk memberikan bantuan ekonomi. Prioritas utama antara lain meningkatkan perawatan kesehatan, memperluas cakupan perlindungan sosial, dan mendukung sektor bisnis. Karena keterbatasan anggaran ini lah beberapa program blue economy yang sudah ada sebelumnya perlu disesuaikan. Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tahun 2020

dipotong sebesar 20 persen. Berkaca dari kejadian tersebut, maka dibutuhkan inovasi untuk mendapatkan sumber pendanaan lain yang dapat menunjang pendanaan biru (*blue finance*) untuk menggerakan pertumbuhan di sektor kelautan dan perikanan.

2. Belum Optimalnya WPP dalam Pengelolaan Perikanan.
   Menyadari adanya tantangan terkait koordinasi lintas batas provinsi, pemerintah meluncurkan sistem Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) pada tahun 2014. Setiap WPP mencakup beberapa pemerintah provinsi, pemangku kepentingan dari sektor industri dan masyarakat. Kelompok-kelompok ini diwakili di oleh Lembaga Pengelola Perikanan (LPP), yang bertanggung jawab untuk memberikan masukan dalam proses pengambilan keputusan di WPP tersebut. Walaupun sistem ini dijadikan prioritas nasional, LPP belum memiliki anggaran operasional khusus dan seringkali kekurangan SDM, kantor, dan peralatan.
3. Infrastruktur yang Tidak Memadai dan Jumlah Wisatawan yang Meningkat Menjadi Ancaman Bagi Destinasi Wisata Laut dan Pesisir.
   Dengan keterbatasan infrastruktur dasar dan layanan bagi masyarakat yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, berdampak terhadap destinasi wisata laut dan pesisir utama. Sebagai contoh, di kawasan pariwisata Lombok pada tahun 2015, sebelum ditetapkan sebagai salah satu lokasi prioritas untuk pembangunan pariwisata, hanya 45 persen rumah tangga memiliki akses ke air ledeng, akses sanitasi sebanyak 48 persen, dan layanan pengumpulan sampah sebanyak 26 persen. Tekanan yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup diperparah dengan semakin meningkatnya kebutuhan wisatawan dan sektor bisnis. Hal ini berdampak terhadap persepsi wisatawan yang terlihat dari ulasan online 6 Buletin APBN Vol. VIII. Ed. 1, Januari 2023 yang diberikan di TripAdvisor, wisatawan mengungkapkan ketidakpuasan mereka mengenai pesisir pantai selatan Lombok, termasuk buruknya sanitasi dan pencemaran di daerah tersebut (Horwath, 2017). Selain itu juga di Taman Nasional Komodo menunjukkan tanda-tanda awal kerusakan lingkungan, yang mana banyaknya wisatawan yang menemukan sampah plastik di laut meningkat dari sekitar 10 persen pada tahun 2009 menjadi lebih dari 50 persen pada tahun 2017 (Harvey et al. 2018).

4. Strategi apa yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ketahanan ekonomi untuk UMKM daerah pantai kenyamukan

Salah satu strategi dalam mengoptimalkan nilai tambah ekonomi sumber daya kelautan dapat dilakukan melalui konsep *blue economy.* Pengembangan konsep blue economy sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Kerangka pembangunan blue economy merupakan penjabaran dari amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Indonesia (RPJPN) 2005-2025, khususnya mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat, maju, dan tangguh melalui pelaksanaan

pembangunan berkelanjutan. Kerangka pembangunan blue economy juga dicantumkan mulai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia (RPJMN) 2005-2009 hingga RPJMN 2020-2024. Dalam RPJMN 2020-2024 ditekankan pentingnya pengelolaan kelautan dengan baik untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan. Konsep *blue economy* berupaya mewujudkan keseimbangan antara aspek-aspek yang terkait dalam ekosistem kelautan yaitu ekonomi dan ekologi

Kekuatan (*Strength*)

1. Memiliki potensi wisata hutan mangrove untuk dikembangkan ditinjau dari aspek teknis,finansial, dan ekonomis.
2. Adanya UMKM di sekitar daerah Pantai Kenyamukan
3. Ketersediaan dan kemampuan lahan untuk pengembangan
4. Adanya lokasi pantai yang strategis
5. lingkungan pantai yang masih bersih
6. Pelabuhan berupa jembatan sudah tersedia yang salah satunya digunakan nelayan untuk melakukan bongkar tangkapan ikan
7. Adanya UMKM di sekitar daerah Pantai Kenyamukan

Kelemahan (*weakness*)

1. Minimnya pengetahuan pada UMKM perihal yang usaha yang dikembangkan
2. Minimnya keterlibatan pemerintah dalam memaksimalkan pengembangan potensi wisata
3. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan wisata mangrove Kurangnya kesadaran wisata
4. Dibutuhkan investasi yang sangat besar untuk mempercantik pantai kenyamukan dengan berbagai wisata dan atraksi pantainya

Peluang (*Oppurtunity*)

1. Dukungan dari pemerintah untuk memberikan pelatihan dan mengeksploitasi ragam hayati dan nabati sesekitaran pantai untuk dijadikan pengembangan UMKM
2. UMKM dapat menciptakan kesempatan kerja di bidang pariwisata
3. Dukungan penguatan perundang-undangan tentang pengelolaan konservasi mangrove dalam pemanfaatan dan penanganannya
4. Penyuluhan sadar wisata kepada masyarakat
5. Promosi Digital agar terus memupuk minat wisatawan untuk berkunjung
6. Dapat menjadi tempat menambah pengetahuan dan edukasi mangrove
7. Mengaktifkan pokdarwis

Ancaman (*Threat*)

1. Perilaku dan aktifitas akan kesadaran pengunjung masih minim sehingga dapat merusak kelangsungan mangrove
2. UMKM kurang tanggap dalam memupuk pengembangan usaha berkelanjutan

3. Terjadinya Abrasi pantai di kawasan wisata mangrove

   Peran stakeholder dalam pengembangan wisata mangrove.
4. Terdapat objek wisata mangrove lainnya yang lebih menarik dan mudah dijangkau

Strategi Kekuatan-Peluang (S-0)

1. Peningkatan pengetahuan UMKM yang dapat di kembangkan oleh pemerintah Kutai Timur
2. Peningkatan partisipasi masyarakat setempat dengan keterpaduan pengelolaan pemanfaatan sumber-sumber daya pesisir berkelanjutan
3. Peningkatan pelayanan berupa promosi atraksi wisata di media sosial dengan memberikan informasi keberadaan lokasi wisata mangrove yang strategis dan bersih
4. Memanfaatkan tren wisata alam dengan menambah aktifitas wisata sehingga lebih beragam
5. Regulasi pemerintah terhadap keberadaan dan pengembangan potensi wisata mangrove
6. Mengintegrasikan sektor lainnya (multisektor) sehingga meningkatkan permintaan destinasi wisata

Strategi Kelemahan- Peluang (W-O)

1. Kerjasama dengan pihak bersedia berinvestasi
2. Membangun kerjasama dengan pihak kedua yang memiliki kemampuan dalam mengelola kawasan wisata mangrove
3. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana wisata dan sarana, aksesbilitas ke dalam lokasi wisata
4. Penyuluhan sadar wisata dengan membuat kelompok-kelompok masyarakat dengan melibatkan elemen mayarakat dan penggiat pariwisata dari lingkungan pemerintah dan swasta
5. Pemerintah dapat mengatur hubungan kerjasama dengan pemerintah daerah dan stakeholder untuk mengelola kawasan wisata mangrove berkelanjutan

Strategi Kekuatan – Ancaman (S-T)

1. Perlu dukungan pemerintah tentang pengetahuan pengembangan usaha berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam di sekitar pantai kenyamukan
2. Memanfaatkan dana CSR perusahaan multinasional dan bekerjasama dengan penggiat lingkungan yang ada di Kutai Timur
3. Mengintegrasikan pihak-pihak yang berkaitan satu dengan lainnya sehingga fungsi kawasan wisata mangrove dapat lebih maksimal.

4. Lebih banyak melibatkan pokdarwis di daerah pantai kenyamukan hingga dapat menggali, membina dan mengembangkan potensi sumber daya wisata serta daya tarik wisata.
5. Keunikan potensi mangrove yang digabungkan dengan pantai merupakan wisata dengan keunikan tersendiri sehingga pemanfaatan tambak ikan,udang sebagai pemancingan dapat dijadikan sebagai aktraksi tambahan
6. Perlunya dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah

Strategi Kelemahan – Ancaman (W-T)

1. Mengoptimalkan Pelatihan dan edukasi pada UMKM yang ada di Pantai Kenyamukan dan sekitarnya
2. Menjaga kebersihan pantai karena pantai yang kotor tidak akan di kunjungi oleh Turism lokal
3. Meningkatkan kesadaran dari seluruh pihak agar kebersihan lokasi wisata tetap terjaga
4. Meningkatkan promosi secara intensif dengan bekerjasama dengan pihak lain maupun yang dipromosikan sendiri
5. Adanya kolaborasi yang terjalin dengan baik antara pemerintah, kalangan akademisi, organisasi mangrove dan masyarakat dalam pengelolaan mangrove dan sekitarnya.

SIMPULAN

Strategi sangat penting pada penelitian ini utamanya dalam peningkatan pengawasan pada *blue economy*, selain peningkatan sarana dan prasarana juga pelatihan dan sosialisasi maupun bimbingan secara tehnis dalam mengembangkan usaha masyarakat di sekitar Pantai kenyamukan.

Pemerintah maupun pengaturan yang mendukungnya sampai sekarang dirasa belum maksimal terus dilakukan pemetaan usaha dan di dukung dengan kebijakan yang bisa membuat masyarakat yang melakukan usaha di pantai kenyamukan. Pengembangan UMKM perlu mendapatkan perhatian yang sangat besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UMKM dengan cara mengupayakan UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang secara kondusif, meningkatkan perannya dalam memberdayakan UMKM, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya.

Referensi :

Dhani Akbar, Ryan Anggria Pratama, Yudhyo, Riama Lisnawati Sianturi, & Nadya Triyana. (2022). Strategi Pengembangan Blue Economy Wilayah Perbatasan Indonesia: Tata Kelola Ekonomi Maritim Pesisir Kepulauan Riau. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *4*(1), 166–177. https://doi.org/10.52423/neores.v4i1.8

Hossain, M. S., Sharifuzzaman, S. M., Nobi, M. N., Chowdhury, M. S. N., Sarker, S., Alamgir, M., Uddin, S. A., Chowdhury, S. R., Rahman, M. M., Rahman, M. S., Sobhan, F., & Chowdhury, S. (2021). Seaweeds farming for sustainable development

goals and blue economy in Bangladesh. *Marine Policy*, *128*. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104469

Jones, A., & Navarro, C. (2018). Events and the blue economy. *International Journal of Event and Festival Management*, *9*(2), 204–222. https://doi.org/10.1108/IJEFM-09-2017-0055

Nasution, M. (2022). POTENSI DAN TANTANGAN BLUE ECONOMY DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA: KAJIAN LITERATUR THE POTENTIAL AND CHALLENGES OF THE BLUE ECONOMY IN SUPPORTING ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA: LITERATURE REVIEW. In *Jurnal Budget* (Vol. 7, Issue 2).

Niner, H. J., Barut, N. C., Baum, T., Diz, D., Laínez del Pozo, D., Laing, S., Lancaster, A. M. S. N., McQuaid, K. A., Mendo, T., Morgera, E., Maharaj, P. N., Okafor-Yarwood, I., Ortega-Cisneros, K., Warikandwa, T. V., & Rees, S. (2022). Issues of context, capacity and scale: Essential conditions and missing links for a sustainable blue economy. *Environmental Science and Policy*, *130*, 25–35. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.01.001

Novaglio, C. (2022). Deep aspirations: towards a sustainable offshore Blue Economy. *Reviews in Fish Biology and Fisheries*, *32*(1), 209–230. https://doi.org/10.1007/s11160-020-09628-6

Petrea, S. M., Zamfir, C., Simionov, I. A., Mogodan, A., Nuță, F. M., Rahoveanu, A. T., Nancu, D., Cristea, D. S., & Buhociu, F. M. (2021). A forecasting and prediction methodology for improving the blue economy resilience to climate change in the romanian lower danube euroregion. *Sustainability (Switzerland)*, *13*(21). https://doi.org/10.3390/su132111563

Wiratma, H. D. . & N. T. (2018). PELUANG PENERAPAN KONSEP BLUE ECONOMY PADA USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR. *Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, *4*(2), 39–44.

Y. A. Wahyuddin, Raka Maypangestu Hidayat, & Tri Ridho Verdiansyah. (2022). STRATEGI KEBIJAKAN BLUE ECONOMY INDONESIA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PADA ERA JOKO WIDODO. *Sriwijaya Journal of International Relations*, *2*(2), 70–87. https://doi.org/10.47753/sjir.v2i2.49

.